

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Australia adalah negara persemakmuran Inggris yang terletak di kawasan Asia Pasifik dan memiliki hubungan yang erat dengan Eropa dan Amerika Serikat sejak lama berdasarkan sejarahnya. Australia merupakan salah satu negara maju (meskipun mungkin belum dapat dikatakan sebagai negara adidaya atau negara *super power*) di kawasan Asia Pasifik. Adapun alasan penulis ingin membahas tentang aliansi Australia dan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard, terutama keterlibatan Australia dalam invasi AS ke Irak tahun 2003, yaitu karena :

1. Penulis mengambil konsentrasi studi "Asia Pasifik" pada jurusan S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sehingga, penulis pernah mengambil dan mengikuti mata kuliah "Politik dan Pemerintahan Australia", mata kuliah "Keamanan Asia Pasifik", dan mata kuliah "Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat".
2. Sejarah terbentuknya negara Australia, sistem politik dan pemerintahan Australia, hingga perubahan postur dan aliansinya dalam bidang / hal keamanan dan militer beserta segala fenomena (rangkaiannya peristiwa)

yang ada sangat unik dan menarik untuk dikaji. Selain itu, setiap Perdana Menteri yang berkuasa tentulah memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan memilih "**Aliansi Australia dengan Amerika Serikat dalam Invasi ke Irak tahun 2003**" sebagai judul skripsi.

B. Latar Belakang Masalah

Australia adalah negara yang dapat dikatakan sebagai sekutu Amerika Serikat yang paling setia setelah Inggris. Australia secara tegas mendukung kebijakan-kebijakan Amerika Serikat, yaitu terutama dalam hal / bidang pertahanan dan militer, terhitung sejak Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk 1991, dan yang terbaru perang di Afghanistan dan Irak. Sejak berakhirnya Perang Dunia kedua, militer Australia secara resmi "membonceng" AS dan sebagai konsekuensinya tentara Australia harus mendukung Amerika Serikat dalam setiap peperangan tersebut.¹

Amerika Serikat sepertinya telah menjadi faktor penting dalam kebijakan pertahanan Australia selama lebih dari 60 tahun dengan pemberian jaminan keamanan yang kuat untuk Australia, termasuk penangkal nuklir yang diperluas. Postur pertahanan Australia diperkuat dengan akses ke

¹Beeson, Mark. 2003. *Australia's Relationship with the United States: The Case for Greater Independence*. Australian Journal of Political Science, vol. 38, No. 3 November, pp 387-405. Carfax Publishing.

intelijen Amerika Serikat. Selain itu, bidang pendidikan, senjata dan militer Australia juga mendapatkan perhatian dari Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya sejak Perang Vietnam, muncul perdebatan di Australia mengenai apa yang sebenarnya AS harapkan dari aliansi kedua negara dan tentang arti kekuasaan AS di era kontemporer bagi Australia.

Terpilihnya kembali George Walker Bush sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode yang kedua kali (berturut-turut, 20 Januari 2001 – 20 Januari 2009) dan John Howard sebagai Perdana Menteri Australia (11 Maret 1996 – 3 Desember 2007), tampaknya memberikan nuansa negatif terhadap perkembangan politik di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kedua tokoh itu mempunyai pandangan yang sama terhadap situasi politik internasional di masa itu.

Pada Januari 2002, Presiden Bush menamakan 3 negara (yaitu Irak, Iran, dan Korea Utara) sebagai “axis of evil” yang menimbulkan “ancaman” bagi dunia. Sejak saat itulah, doktrin Presiden Bush tersebut kemudian menjadi arah kebijakan luar negeri Australia di masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard. Ketika AS mulai merealisasikan rencana invasi ke Irak, pemerintah Australia sangat mendukung penuh rencana AS tersebut, meskipun sikap publik Australia terhadap politik luar negeri AS terbagi menjadi 2, ada yang mendukung dan ada juga yang tidak.

Berbagai kota besar di Australia, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2003, dilanda unjuk rasa besar-besaran yang ke sekian kalinya guna

Timur Tengah sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana AS menyerang Irak.² Tidak kurang dari 5.000 orang hari Sabtu tersebut melakukan unjuk rasa di pusat kota Canberra, ibukota Australia, sebagai protes terhadap keterlibatan Australia dalam rencana perang terhadap Irak. Unjuk rasa yang diperkirakan terbesar yang pernah terjadi di Canberra itu dilakukan secara damai, dan diwarnai dengan orasi dari sejumlah pembicara seperti politisi dari Partai Buruh Australia serta tokoh agama Katolik setempat. Pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan pernyataan anti-perang yang menentang kebijakan Pemerintah Australia dalam kaitan dengan pengiriman pasukan ke Timur Tengah. Salah satu spanduk itu berbunyi, "Australia Jangan ikut Koalisi Pembunuhan".

Di Perth, unjuk rasa diperkirakan melibatkan sedikitnya 10 ribu warga Australia, begitu juga di Hobart dan Melbourne serta Sydney. Pemimpin Partai Hijau, Bob Brown mengatakan di Hobart bahwa rakyat Australia menentang perang terhadap Irak karena perang itu dilakukan demi minyak bukan kemanusiaan. Para pengunjuk rasa meminta Perdana Menteri Australia John Howard menarik kembali pasukan Australia yang telah dikirim ke kawasan Timur Tengah dan tim pemeriksa senjata PBB diberikan waktu agar masalah Irak dapat diselesaikan secara damai.

Ketua Partai Demokrat Australia, Andrew Bartlett pun mendesak agar Perdana Menteri John Howard tidak mengabaikan aspirasi rakyat Australia yang menentang perang terhadap Irak. Menurutnya, Howard tidak bisa

menutup mata dan tidak mempedulikan sikap rakyat Australia yang ditunjukkan dalam unjuk rasa anti-perang tersebut.

Menurut Andrew Bartlett, PM John Howard tidak memiliki mandat untuk melibatkan pasukan Australia dalam perang karena rakyat Australia kini ternyata menentangnya. Ia menggambarkan sikap anti-perang Irak yang kini dimiliki rakyat Australia lebih besar dibandingkan dengan sikap anti-perang Vietnam beberapa puluh tahun lalu. Unjuk rasa anti-perang Vietnam tidak sebesar yang terjadi saat unjuk rasa menentang Perang Irak ini. Menurut Andrew Bartlett pula, unjuk rasa sekarang ini adalah unjuk rasa yang terbesar dalam sejarah.

Mantan Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Jenderal Peter Gration, merupakan salah satu orang yang menentang sikap pemerintahnya yang ikut bergabung dalam invasi itu.³ Ia menyebut perang itu "tidak bermoral, ilegal, dan tidak perlu". Gration mengaku tidak tahu alasan sebenarnya untuk pergi berperang karena tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan dan Irak tak terlibat dalam serangan 11 September 2001 ke AS. Menurut Gration, ini pertama kalinya Australia mengambil tindakan ofensif terhadap negara yang tak melakukan kejahatan apa-apa terhadap negara Australia. Bahkan Australia masih menjual gandum kepada Irak. Jenderal Peter Gration tak ingin hal seperti ini terjadi lagi.

Perdebatan yang muncul adalah apakah Australia sebaiknya mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak meskipun tanpa mandat PBB, dan

³ <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/20/118468110/Satu-Dekade-Invasi-Amerika-Serikat-ke-Irak> (online)

apakah perang ini dapat disebut sebagai "just war" meski tanpa mandat PBB.⁴ Meskipun muncul banyak perdebatan di mana-mana dan terjadi unjuk rasa besar-besaran di berbagai wilayah di Australia, namun pemerintahan Perdana Menteri John Howard tetap meyakini pentingnya aliansi Australia dengan Amerika Serikat, khususnya dalam perang melawan terorisme.

Pengiriman pasukan Australia ke Irak menjadi bahan perdebatan, karena protes tidak hanya datang dari luar negeri, akan tetapi juga terjadi di dalam negeri Australia sendiri, mulai di antara kalangan masyarakat biasa hingga orang-orang yang berada di dalam gedung parlemen. Suara mereka terbagi antara menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan tersebut. Terlepas dari perdebatan-perdebatan tersebut, pemerintah Australia tetap saja mengirimkan pasukannya sebanyak sekitar 2.000 personil angkatan bersenjata Australia (Australian Defence Force / ADF), tentara-tentara Australia tersebut dikirim untuk membantu tentara Amerika Serikat berperang di Irak. Walaupun terjadi banyak protes di dalam negerinya sendiri, namun tentara Australia masih banyak yang bertahan di Irak, jumlahnya diperkirakan berjumlah sekitar 1.300 personil. Dengan demikian berarti Australia menjadi negara terbesar ketiga yang mengirim pasukan ke Irak setelah Amerika Serikat dan Inggris.

Analisis dari The Sidney Morning Herald menunjukkan biaya kotor yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia setidaknya sebesar \$ 2,94 miliar

⁴ D. ... A. ... Hamilton, dalam "Just War" *Eureka Street*, Januari/Februari 2003.

pada akhir tahun keuangan negara tahun 2007.⁵ Adapun biaya tambahan untuk Irak diidentifikasi oleh Herald adalah :

- \$ 494,5 juta di dasar upah dan biaya personil untuk pasukan Angkatan Pertahanan Australia dikerahkan di Irak tidak termasuk dalam angka pengeluaran tambahan bersih ;
- \$ 211,5 juta dihabiskan oleh Luar Negeri dan departemen lain pada bantuan , rekonstruksi , kehadiran diplomatik Australia di Baghdad dan konsesi pajak bagi tentara ;
- \$ 668 juta utang Irak dibebaskan oleh Australia

Biaya keterlibatan Australia di Irak meningkat sejak awal invasi memberi jalan untuk pemberontakan yang berlarut-larut . Tidak termasuk keringanan utang , biaya tahunan telah meningkat dari hanya lebih dari \$ 400 juta pada 2003-2004 untuk \$ 576,6 juta tahun keuangan ini. Tapi biaya Australia masih dikerdilkan oleh biaya untuk pembayar pajak AS, yang mencerminkan komitmen yang jauh lebih besar militer negara itu

Ekonom pemenang Hadiah Nobel Joseph Stiglitz telah menghitung biaya langsung perang kepada Pemerintah AS lebih dari \$ US750 miliar (\$ 938.000.000).

⁵<http://www.smh.com.au/news/national/3b-and-rising-rapidly-cost-of-iraq-war/2007/03/20/1174153066804.html>

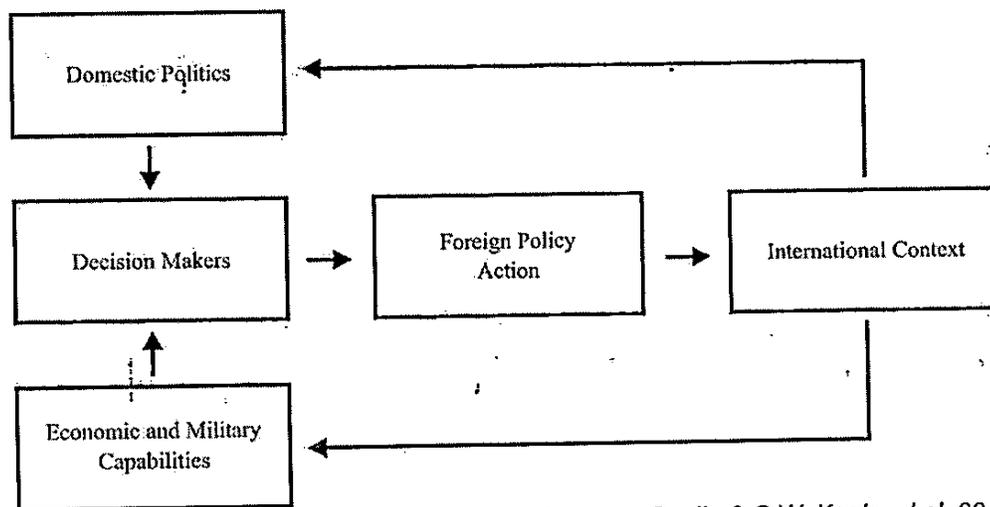
C. Rumusan Masalah

Mengapa Australia pada masa pemerintahan PM John Howard turut serta dalam invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003?

D. Kerangka Pemikiran

Teori pembuatan keputusan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton: "Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik, dituangkan dalam terminologi kepentingan nasionalnya". Dari definisi tersebut terlihat empat unsur dalam politik luar negeri, yaitu strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal, dan kepentingan suatu negara. Jadi, politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.⁶

Teori digunakan untuk membantu kita dalam menentukan tujuan serta arah penelitian dan dalam memilih konsep yang tepat untuk membentuk suatu hipotesis.⁷ Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.⁸ Decision-Making Theories oleh William D. Coplin :



Gambar 1.1. Decision-Making Theories oleh W.D. Coplin & C.W. Kegley, hal. 30.

Dalam hal ini, penulis mencoba menggunakan teori dari William D. Coplin untuk menganalisis dan membatasi masalah yang ingin dikaji sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis buat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa biasanya para pengambil keputusan (*the decision makers*) memiliki banyak pertimbangan sebelum pelaksanaan proses

⁷ Koentjoroningrat. 2000. *Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ke-3 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), hal.21

⁸ Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta : LP3ES), hal.185

pengambilan keputusan. Menurut Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara dapat dianggap sebagai hasil dari tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu konteks internasional, politik domestik, serta kemampuan ekonomi dan militer. Adapun yang dimaksud dengan konteks internasional yaitu suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh negara (baik pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang) yang mungkin terjadi atau yang dapat diantisipasi.⁹

William D. Coplin berpendapat bahwa konteks internasional adalah produk dari kebijakan luar negeri negara lain, di mana konteks internasional secara tegas akan mempengaruhi politik domestik, sekaligus ekonomi dan militer negara tertentu. Faktor-faktor ini akhirnya akan mempengaruhi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Selain itu, ia berpendapat bahwa politik internasional adalah perilaku dan komitmen dari negara tertentu terhadap isu-isu internasional. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri dapat dilakukan sebagai sarana dalam memperoleh kepentingan nasional tertentu, terlepas dari banyak pengaruh dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan luar negeri itu sendiri. Ketika mendeskripsikan politik luar negeri, kita akan membahas tiga jenis keputusan luar negeri, yaitu: (1) keputusan-keputusan politik luar negeri yang sifatnya umum, (2) keputusan-

keputusan yang bersifat administratif, dan (3) Keputusan-keputusan yang bersifat krisis.¹⁰

Masih menurut Coplin, pengambilan keputusan dalam menentukan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

1. Politik Dalam Negeri

Kondisi domestik memiliki pengaruh dalam menentukan output kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk budaya dan sistem politik (autokratis maupun demokratis) yang berjalan beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya. *Domestic Politics* (situasi politik dalam negeri) termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Selain itu, pembuatan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri yang tengah dihadapi. Di mana banyak analis politik internasional berargumentasi bahwa konsekuensi yang mempersatukan dari krisis eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan politik luar negeri, yang dihadapkan pada instabilitas didalam negeri, menjadi agresif di luar negeri.¹¹

Dalam politik internasional, meski negara sebagai aktor pelaku, namun manusia dengan peran sebagai pembuat keputusan melakukan aksi dan reaksi. Manusia bukan satuan yang abstrak yang biasa disebut negara, ia menetapkan dan memainkan konsep

kepentingan nasional, merencanakan strategi, memaknakan isu, membuat keputusan untuk bertindak serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Pembuatan keputusan di dalam politik luar negeri sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bangsa. Pada kebanyakan negara, pimpinan pemerintah (presiden, perdana menteri ataupun raja) memainkan peran sebagai pembuat keputusan suatu negara.¹²

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Faktor kedua ini tidak kalah penting yaitu, keadaan ekonomi dan militer, sangat mempengaruhi kemampuan diplomasi suatu negara, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan dan keamanan. Faktor ekonomi dan militer memainkan peranan penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena berpengaruh terhadap kekuatan menekan yang harus dimiliki dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang mempunyai kemampuan ekonomi dan militer yang kuat dipastikan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam hubungannya dengan negara lain. Kemampuan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat GNP-nya (Gross National Product), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Selain GNP, indikator ekonomi lainnya

adalah GNP perkapita atau pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi tersebut.¹³ Jadi dapat diasumsikan bahwa, semakin besar GNP negara bersangkutan maka semakin makmur dan kayalah negara tersebut. Ada pun dalam hal militer, kekuatan militer suatu negara dapat ditaksir kapasitasnya dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan, serta sifat perlengkapan militer.¹⁴

Dengan majunya perekonomian suatu negara, maka alokasi untuk pendanaan militer pun akan semakin besar. Namun ada juga negara miskin yang mengalokasikan dana untuk militer lebih besar dari pada untuk pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh dasar dari kekuatan nasional negara ini bertumpu pada militer. Biasanya negara yang berdasarkan militer adalah negara yang sedang bertikai atau bersengketa dengan negara lain.

Ekonomi dan militer merupakan faktor yang terkait satu sama lain. Antara yang satu dengan yang lain saling menunjang. Perkembangan ekonomi mendorong kemajuan militer, baik itu dari segi kuantitas pasukan dan persenjataan maupun pendanaan untuk pengembangan militer itu sendiri. Kestabilan perekonomian juga ditunjang oleh keamanan negara tersebut. Dalam hal ini kestabilan keamanan. Dengan adanya keamanan yang terjamin mendorong

¹³William D. Coplin. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung : Penerbit Sinar Baru, hlm.115

¹⁴Ibid, hal 124

masyarakat untuk berusaha mencapai perekonomian yang lebih baik. Dalam kondisi negara yang masih dalam perkembangan bahkan cenderung miskin dan ketika keamanan nasional menjadi hal yang sangat penting. Antara ekonomi dan keamanan tidak dapat berjalan beriringan, salah satu harus dikorbankan.

3. Konteks Internasional

Kondisi internasional mempengaruhi aktivitas dan kebijakan politik luar negeri. Pengaruh yang ditimbulkan berasal dari tiga elemen, yaitu geografis, ekonomi dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi-lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antar negara, itu dengan negara-negara lainnya. Dari ketiga elemen itu, elemen geografi merupakan elemen yang memainkan peran politik luar negeri yang penting.

Hubungan politik dengan negara-negara lain sangat mempengaruhi dalam lingkungan sangat berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara. Erat dan longgarnya hubungan suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi suatu negara dalam mengambil suatu keputusan, khususnya untuk memperoleh dukungan dari negara lain

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka berpikir di atas, maka dapat diambil dugaan / kesimpulan yang bersifat sementara, bahwa dukungan penuh dan keikutsertaan Australia terhadap invasi AS ke Irak pada tahun 2003 yaitu karena faktor-faktor berikut ini :

1. *Domestics politics* (situasi politik dalam negeri Australia), yaitu berupa dukungan dari Partai Liberal, terutama di parlemen.
2. *International context* (kondisi Australia dalam konteks internasional), yaitu adanya pakta pertahanan ANZUS yang mengikat Australia yang dirumuskan pada tanggal 1 September 1951 dan mulai berlaku sejak tanggal 29 April 1952.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan pustaka dengan memaparkan teori, konsep, maupun data-data yang bersumber dari buku-buku ilmiah, artikel media massa cetak, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber informasi online melalui internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut yang dianggap relevan.

Penulis melakukan metode deduktif dalam menyusun skripsi ini, yaitu dengan mendasarkan pada kerangka berpikir atau teori yang ada, kemudian

dibuktikan melalui data-data empiris yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini lebih bersifat penelitian / studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder atau data verbal yang diperoleh dari hasil tulisan, laporan, atau penelitian orang lain atau lembaga pengkajian yang sudah dipublikasikan.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, jangkauan penelitian atau ruang lingkup skripsi ini hanya akan membahas dukungan Australia terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard (1996-2007), terutama menyoroti dukungan penuh Australia terhadap invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Namun penulis tidak mengesampingkan data-data di luar jangkauan atau rentang tahun tersebut sehingga dimungkinkan akan ada pembahasan atau data-data di luar tahun tersebut yang diperoleh, selama masih berkaitan dan relevan dengan masalah ini.

H. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Australia mendukung Amerika

Howard, sehingga akan didapat pemahaman dari rumusan masalah, hipotesis, dan kesimpulan yang didapat. Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan / menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan, serta untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar kesarjanaan (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Membahas kontroversi keterlibatan Australia (aliansi Australia-AS) dalam invasi ke Irak .

Bab III : Penjelasan dan analisa kondisi dalam negeri Australia sebagai faktor *domestic politics*. Dibagi menjadi dua pembahasan, yang pertama membahas Proses Pembuatan Kebijakan di Australia. Kemudian yang kedua membahas Kondisi Yang Mempengaruhi

Bab IV : Penjelasan dan analisa Australia dalam *international context*.

Dibagi menjadi dua pembahasan. Bagian pertama membahas War Against Terrorism, yang kedua membahas pakta pertahanan ANZUS sebagai bentuk kerjasama Australia dan Amerika Serikat dalam bidang hankam.

Bab V : Penutup, yang berisikan rangkuman dari keseluruhan skripsi ini dan kesimpulan.